



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Opini Perempuan sebagai Bagian Kelompok Masyarakat Pascaprogram Penertiban Pemukiman Kampung Pulo dan Kalijodo di Jakarta

Lasmery RM Girsang

Universitas Bunda Mulia, Jl. Lodan Raya 2, Ancol, Jakarta Utara

lgirsang@bundamulia.ac.id

Abstract

This research titles: “Women Opinion as a Group of Community of Society after Settlement Program at Kampung Pulo and Kalijodo”. Specifically, researcher focuses to seek women opinion for this group is still considered as isolated community in a bigger social system. Therefore, this qualitative-case study research will be analyzed by Muted Group Theory (Cheris Kramarae). Through this theory, there’re many hidden opinion from society, especially minority or isolated group who had been pressed by situation. Here, „language“ used is still dominated by masculinity, meanwhile women can’t express their interest, mainly at economic sector. Based on participant observation and in depth interview to all women living at Kampung Pulo (East Jakarta) dan Kalijodo (West Jakarta), this research will contribute to government (DKI Jakarta) as a program evaluation.

Keywords: Women Opinion, Political Communication, Muted Group Theory

Abstrak

Peneliti mengambil topik terkait “Opini perempuan sebagai bagian kelompok masyarakat pasca program penertiban pemukiman di Kampung Pulo dan Kalijodo”. Peneliti tertarik mengkaji opini perempuan secara khusus dikarenakan kelompok masyarakat ini masih dianggap sebagai kelompok yang „terpinggirkan“ dalam sistem sosial yang lebih besar. Untuk itu, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini akan dianalisis melalui „Teori Kelompok Bungkam“ (Cheris Kramarae). Melalui teori tersebut, masih banyak opini tersembunyi atau yang tidak tersampaikan dari sisi masyarakat, khususnya kaum minoritas atau golongan yang merasa tertindas/tertekan oleh situasi dan kondisi yang ada sehingga terbentuk pembungkaman. Adapun „bahasa“ yang digunakan masih didominasi maskulinitas dimana para warga perempuan masih belum dapat menyuarakan kepentingannya terutama dalam bidang ekonomi. Dengan mengedepankan observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap narasumber perempuan yang pernah menetap di kawasan Kampung Pulo (Jakarta Timur) dan Kalijodo (Jakarta Barat), penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah provinsi (pemprov) DKI—pada khususnya—atas perbaikan suatu program kegiatan.

Kata kunci: Opini Perempuan, Komunikasi Politik, Teori Kelompok Mutasi

Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Dewasa ini, perempuan masih menjadi kelompok yang termarginalkan. Kenyataan tersebut juga tidak jauh berbeda dalam

fenomena sosial sehari-hari. Pada kehidupan nyata—dimana kaum hawa telah banyak disibukkan dengan urusan rumah tangga—para perempuan juga turut terkena dampak dari

regulasi pemerintahan setempat. Beragam upaya perbaikan dan pembenahan yang berkesinambungan dikerjakan pemerintah provinsi (pemrov) DKI Jakarta khususnya di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sedikit banyaknya juga turut memberikan andil atas kurang berdayanya perempuan untuk menyalurkan pendapatnya. Salah satu upaya penertiban kawasan liar yang diproyeksikan sebagai lahan terbuka menjadikan warga—dan juga kaum perempuan di kawasan yang dimaksud—semakin terbatas ruang geraknya, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Adalah sekelompok perempuan yang dahulu menetap di kawasan Kampung Pulo (Jakarta Timur) dan Kalijodo (Jakarta Barat) yang merupakan wilayah target relokasi diantara wilayah-wilayah kumuh lainnya. Mayoritas dari para perempuan tersebut berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di sektor informal. Para perempuan harus menghadapi konsekuensi kebijakan publik tersebut. Jika menilik kebijakan relokasi, beberapa dampak dari pelanggaran di dua hunian yang dijadikan tempat usaha tersebut adalah banjir. Penyebabnya tentu dikarenakan kurangnya lahan hijau/serapan sehingga debit air berkurang. Beragam upaya signifikan Pemprov DKI memang diprioritaskan untuk meminimalisir dampak banjir dengan menggalakkan pembersihan di semua tempat-tempat yang berpotensi mengalami banjir.

Terlebih lagi, pemrov DKI menilai permasalahan di kawasan Kalijodo merupakan persoalan yang melanggar aturan. Tidak sekedar pendirian bangunan liar di jalur hijau, namun terlebih lagi menjadikan bangunan ilegal tersebut sebagai kafe dan lokasi prostitusi. Terdapat juga misi yang diemban Pemrov DKI, yakni memberantas PEKAT (PENyakit masyaraKAT) atau penyakit sosial, khususnya prostitusi. Pemrov DKI dengan segala wewenang tugas yang dijalankan sepenuhnya demi kepentingan publik, tidak „memandang bulu“ atas publik mana yang akan menjadi target

asaran, termasuk daerah mana yang juga harus dibenahi.

Pada akhirnya, beragam pemberitaan media terkait upaya relokasi/penertiban/penggusuran di kawasan Kampung Pulo dan Kalijodo telah menarik atensi publik. Dampak besar dari pemberitaan tersebut telah „menyedot“ opini masyarakat. Dengan telah dihuninya kawasan tersebut oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, adalah wajar jika timbul pergolakan atau penolakan atas penggusuran yang dilakukan Pemrov DKI. Upaya sosialisasi dan pemberitahuan secara bertahap yang diberikan pemerintah dirasa kurang memadai bagi masyarakat di kawasan tersebut. Hingga sampai pada waktunya, pemerintah bertindak yakni dengan melakukan penggusuran yang menurunkan pasukan keamanan dalam jumlah ribuan personil agar meminimalisir tindakan agresif dari warga yang menolak kebijakan tersebut.

Jika dilihat dari usainya tindakan penertiban tersebut, sebenarnya Pemprov DKI juga tentu menyeimbangkan kebijakan yang ditetapkan dengan upaya solutif. Warga eks-Kalijodo telah dipindahkan (direlokasi) di rusunawa (hunian rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi penghuninya). Namun tetap saja, perlu waktu yang lama bagi warga untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dengan sistem yang baru sama sekali dengan hunian sebelumnya. Kehidupan yang bebas tanpa aturan sangat berbenturan dengan kondisi yang ada di lingkungan rusunawa.

Berdasarkan pemaparan di atas, tentu banyak opini-opini tersembunyi/yang tidak tersampaikan dari sisi masyarakat, khususnya kaum

minoritas atau golongan yang merasa tertindas/tertekan oleh situasi dan kondisi yang ada. Apakah solusi yang diberikan Pemprov DKI mutlak benar atau tidak, bagaimana realitas yang sebenarnya yang dialami masyarakat yang terkena dampak program penertiban, tentu tidak

terungkap secara *gamblang* ke publik. Opini-opini yang belum tersampaikan diharapkan dapat tergalikan melalui penelitian ini. Apakah opini-opini yang terbungkam (tidak terucap) akan selamanya dipendam oleh publik sehingga pada waktunya dapat menjadi „bom waktu“ bagi pemerintah jika tidak tertangani dengan baik. Sebaliknya, opini yang baik—yang memang sifatnya dinamis—sebenarnya dapat dimanfaatkan bagi perbaikan suatu program. Beragam persepsi publik—baik pro maupun kontra—menanggapi kebijakan tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji opini publik/masyarakat dari kelompok perempuan saja yang mengalami pembungkaman—yang diistilahkan sebagai masalah komunikasi yang frustrasi (*frustrated communication*). Hal tersebut dikarenakan „perspektif perempuan“ dihalangi pada tingkat ordiner sehingga pengungkapan mereka secara tidak langsung, bergumam dan terbungkam (Griffin, 2012: 469)

Kerangka Teoritis

1. *Muted Group Theory*

Teori Kelompok Bungkam dikelempokkan oleh Griffin kedalam kategori *gender and communication* yang berafiliasi juga dengan kajian-kajian perempuan atau feminisme. Teori yang digagas oleh Cherris Kramarae menekankan beberapa hal dalam teorinya. Antara lain, peran bahasa. Yang terjadi di masa ini adalah bahasa merupakan konstruksi/buatan kaum pria dimana kaum perempuan tidak bebas mengungkapkan keinginan mereka melalui ujaran atau pendapat (karena telah didominasi oleh kaum pria). Seperti definisi berikut:

“Muted group happens whenever people belonging to low-power groups who must change their language when communicating publicly, thus their ideas are often overlooked; e.g., women. Men’s dominant power position in society guarantees that the public mode of expression won’t be directly available to women” (Griffin, 2012: 461).

Ide penting dalam teori tersebut juga dapat diterjemahkan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna, harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan, jadi kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Beberapa tokoh lainnya (Edwin dan Shirley Ardener) turut menjelaskan bahwa wanita atau anggota dari kelompok bawah mana pun memang berbicara, tetapi kata-kata mereka berjatuh pada telinga yang tuli, pada akhirnya tentu saja menjadi tidak diucapkan, yang berarti berbicara atau menyampaikan sesuatu pada kelompok dominan tidak akan mendapatkan tanggapan oleh karenanya menjadi percuma atau sia-sia. Kelompok bungkam dianggap tidak pandai berbicara oleh sistem bahasa kelompok yang dominan. Pada dasarnya munculnya kelompok bungkam adalah disebabkan tekanan dan tindasan terhadap suatu kelompok baik dalam bentuk ras, gender, pekerjaan atau dimana suatu kelompok tersebut sulit menyampaikan gagasan atau ide. Kelompok bungkam biasanya terjadi pada wanita-wanita yang tidak bisa menghadapi perubahan dan wanita-wanita yang tidak memperjuangkan emansipasi. Bagi kelompok bungkam, apa yang mereka katakan pertama kali harus bergeser dari pandangan mereka sendiri terhadap dunia dan kemudian diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari kelompok yang dominan. Sebenarnya tidak hanya kaum wanita saja yang dibungkam dan semua pria memiliki suara, tetapi teori kelompok bungkam dapat diterapkan pada kelompok mana pun yang tidak dominan atau bahasa yang tidak memadai. Pembungkaman dapat terjadi sebagai hasil dari ketidakpopuleran pandangan yang berusaha untuk diungkapkan seseorang.

Terdapat asumsi atas dominasi pria yang menyatakan bahwa pria adalah kelompok yang

dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman kaum wanita. Secara umum pria memang digambarkan sebagai seorang yang mempunyai wibawa dan dapat menjadi seorang pemimpin, oleh sebab itu kaum wanita kesulitan untuk mempunyai jabatan sebagai pemimpin. Dalam kehidupan sosial, pria sebagai kelompok yang dominan seringkali mengendalikan banyak keputusan; seperti dalam dunia politik pria yang banyak berbicara daripada wanita, karena pendapat kaum pria yang didengarkan oleh kebanyakan pihak. Bahkan dalam rumah tangga, pria atau seorang ayah dianggap mampu memimpin keluarga. Hal tersebut adalah proses bagaimana kelompok dominan membungkam kelompok mayoritas dan menguasai sistem. Pembungkaman dapat dilawan dengan menyebutkan strategi pembungkaman sebagaimana telah dikemukakan. (Griffin, 2012: 460).

2. Program Penertiban

Merupakan program kerja pemprov DKI yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat/warga DKI Jakarta. Sasaran program penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah para pedagang kaki lima/PKL, masyarakat yang tinggal di tempat liar milik pemprov dan yang tinggal di kawasan lahan hijau. Beragam program penertiban yang menjadi 5 target penertiban pemprov DKI tahun 2015 mencakup penertiban bangunan kios pasar, tertib demonstrasi, tertib lalu lintas, tertib sampah dan tertib hunian (m.liputan6.com/news/read/2159895/ini-5-target-penertiban-pemprov-dki-di-tahun-2015).

3. Perempuan

Menurut Moelyono dkk (2010: 3-4) secara historis, kata „perempuan“ lebih dulu keberadaannya dibandingkan kata „wanita“. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata „perempuan“ bermakna lebih halus; sedangkan „wanita“ merujuk pada orang. Secara bahasa, kata „perempuan“ ialah „yang di-empu-kan“ (empu berarti induk/ahli) sehingga tersirat arti penghormatan (dalam Sadli, 2010: 3). Dalam

tulisannya, Sadli (2009:4-5) turut menguraikan perkembangan pesat studi perempuan di negara barat telah berlangsung sejak 1960-an dengan menyuarakan pendapat tentang kondisi dan peran perempuan di dalam masyarakat. Karena jauh sebelumnya, beberapa tokoh filsafat terkenal—seperti John Stuart Mill dan Sigmund Freud—masih menggunakan ukuran patrialis dalam mengukur peran perempuan. Sehingga, hanya di dalam lingkungan budaya dimana perempuan mempunyai kedudukan dan status sosial yang sama dengan lelaki, barulah perempuan akan lebih dapat menyatakan diri sebagaimana yang ia inginkan. Sebagai penutup, secara singkat disebutkan pula empat determinan yang mempengaruhi perilaku perempuan yaitu: faktor biologi, sosialisasi, kepribadian serta kesempatan partisipasi sosial.

4. Opini

Secara etimologis—mengacu pada „Opini Publik“ (*Public Opinion*) berasal dari dua kata, yaitu opini dan publik. Opini publik juga dapat ditemukan dalam beberapa terminologi, antara lain: „Pendapat Pribadi“, „Pendapat Perseorangan“, „Pendapat Kelompok“, dan „Pendapat Umum“. Pada awalnya, istilah opini publik dipakai dalam konteks politik, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan berpendapat atau ruang publik (*public sphere*) bahkan dikaitkan dengan aktivitas/kegiatan propaganda. Arifin (2008:10,12,18) menjelaskan bahwa pengertian opini publik adalah:

“Pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi menurutnya, opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa (surat kabar, radio dan televisi)”.

“Opini publik pada hakikatnya sangat berperan dalam kehidupan sosial dan politik dimana terdapat tiga fungsi opini publik, yaitu:1) Opini

Publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan, 2)Opini Publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat, 3)Opini Publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik”.

“Opini publik tidaklah berarti harus merupakan pendapat bulat dari semua orang (*everyone*), melainkan hanya pendapat sejumlah orang (*number of persons*). Dalam hal ini muncul suatu pertanyaan sebagai berikut: Mengapa suatu opini publik dalam suatu pemerintahan negara sangat erat kaitannya dengan kekuatan kehidupan sosial dan politik? Apakah benar opini publik dapat berperan sebagai dasar dalam membangun negara demokrasi?”

Penulis mengambil definisi tersebut untuk menegaskan bahwasanya opini publik merupakan salah satu kajian dalam komunikasi politik. Dalam konteks penelitian ini, pihak pengelola rusun merupakan „perpanjangan tangan” Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep „kelompok” pada Teori Kelompok Bungkam, pengelola rusun masuk ke dalam kelompok dominan/mayoritas yang secara structural memiliki kekuasaan dan wewenang atas kelompok minoritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersandar pada paradigma interpretif. Denzin dan Lincoln (2011: 244-245) memberikan definisi:

“*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*”.

Sedangkan Sugiyono (2011:8,15) menguraikan bahwa:

“*Pendekatan kualitatif melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dan dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti padakondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.*”

Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Sebagian studi kasus bercirikan kualitatif yang lebih mengedepankan pandangan holistik dan naturalistik; sementara, sebagian lagi bersifat kuantitatif. Studi kasus kualitatif memiliki ciri bahwa peneliti menghabiskan waktunya di lapangan. Ketika peneliti terjun langsung serta terlibat dengan berbagai aktivitas dan operasi kasus yang diteliti, peneliti juga merefleksikan dan merevisi makna-makna yang bermunculan dari fenomena yang diamati.

Secara umum, terdapat dua macam kasus: kasus tunggal dan holistik. Sementara bila ditilik dari jenis kajiannya (*study*), Denzin & Lincoln (2009: 301) membagi ke dalam: (a) studi kasus intrinsik (*intrinsic study case*); (b) studi kasus instrumental (*instrumental case study*) serta (c) studi kasus kolektif (*collective case study*). Dalam hal ini, peneliti menerapkan studi kasus intrinsik untuk melihat kedalaman dari kasus yang diangkat di dua lokus penelitian ini berjalan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan observasi (yakni *participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai langkah-tahapan pengumpulan data. Observasi berpartisipasi sangat diperlukan agar peneliti mendapatkan gambaran dan pemahaman yang riil dari fenomena yang diamati. Sedangkan wawancara

mendalam diperlukan juga sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Hasil Penelitian

Peneliti menemukan kesulitan untuk mendapatkan para perempuan yang kredibel sebagai narasumber. Tidak banyak warga perempuan yang terbuka untuk memberikan pendapat mereka. Bahkan di awal kedatangan peneliti di lokasi, para perempuan lebih banyak mengelak ketika mengetahui peneliti sebagai pihak luar. Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha untuk melakukan pendekatan dengan warga perempuan di rusun. Hingga akhirnya, hanya ada seorang perempuan yang bersedia untuk berbagi (*sharing*) melalui obrolan ringan namun padat. Hanya saja, atas permintaan yang bersangkutan—Ibu Yanti—narasumber tidak bersedia didokumentasikan dalam bentuk foto/gambar. Pada saat perbincangan berlangsungpun, narasumber meminta didampingi oleh suami yang sekaligus menjadi ketua RW di rusunawa Jatinegara Barat.

Kenangan warga eks-Kampung Pulo masih begitu melekat pada peristiwa pengusuran yang terjadi pada medio Agustus 2015 silam. Selama lebih dari dua tahun menetap di rusunawa Jatinegara Barat, tidak banyak yang mengetahui dengan pasti kehidupan para warga program relokasi dalam keseharian mereka. Dalam sesi pertemuan yang dilakukan peneliti, sebenarnya banyak aspirasi yang diungkapkan warga terkait beragam perubahan yang terjadi pasca relokasi. Salah satunya wawancara dengan Ibu Yanti berikut ini.

Pada awalnya tidak pernah menyewa karena memiliki rumah sendiri. Sampai tercetus ungkapan berikut:

“Kami ini, mimpi juga enggak tinggal di rusun.”

Namun setelah direlokasi, warga merasa kaget dengan biaya sewa dasar di setiap lantai di masing-masing *tower* sebesar Rp. 300.000/bulan (belum termasuk air dan listrik). Jika diakumulasikan, warga membayar sampai Rp. 500.000/bulan. Warga yang tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemprov DKI, merasakan ketidakadilan karena tiga bulan pertama yang digratiskan menghuni di rusun sangat tidak setimpal dengan kerugian yang dialami. Sebelum pengusuran, warga masih bisa bekerja leluasa baik di sektor formal dan informal. Mayoritas para perempuan yang bekerja di sektor informal dulunya membuka warung/kios berjualan sembako dan membantu pekerjaan rumah tangga (cuci gosok). Namun sekarang, miris jika melihat kaum perempuan yang memang tidak memiliki keahlian yang sekarang hanya mengandalkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Terkait usaha pemberdayaan kepada para perempuan pun, dirasakan warga tidak banyak membantu. Diturunkan narasumber, di awal menetap di rusun, banyak dinas/instansi pemerintah yang memberikan ragam pelatihan. Hanya saja, program yang tidak berkesinambungan tersebut dinilai hanya sebagai seremonial, begitu selesai kegiatan, ditinggal begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Salah satunya adalah kursus tata boga—diikuti oleh segelintir perempuan saja—yang tidak disalurkan misalkan untuk membuat usaha *catering* makanan ke kantor-kantor.

Keluhan warga lain adalah terkait tunggakan. Secara periodik, pihak pengelola mencantumkan pengumuman bagi warga yang belum membayar. Melalui ketua RW, disampaikan ke pihak pengelola agar pemberitahuan tersebut jangan ditempel sedemikian rupa karena warga menganggap hal tersebut adalah “aib”.

Oleh karenanya, warga pun menempuh langkah untuk bertemu anggota dewan. Harapan warga agar ada peraturan khusus untuk warga yang direlokasi, jangan disamaratakan. Disampaikan narasumber kepada peneliti,

bahwa warga— melalui ketua RT/RW— acapkali mempertanyakan ke pihak pengelola. Namun respon yang diberikan adalah bahwasanya semuanya kembali kepada peraturan yang ada, pihak pengelola hanyalah pelaksana tugas yang tidak dapat memberikan solusi. Dikarenakan proses *dialog* ke anggota dewan tidak pernah sampai menghasilkan solusi, warga rusun berniat untuk bertemu dengan gubernur (baru: Anis Baswedan). Kepada Jarot—ketika masih menjabat wakil gubernur— pun, warga sudah pernah menyampaikan aspirasinya. Salah satu yang disampaikan warga:

“Kalo kami masih di Kampung Pulo, saya meninggalkan rumah bagi keluarga saya. Kalo di rusun, saya ninggalin kesengsaraan, Pak. Apa yang bisa diwariskan ke anak istri saya?”

Jika mengingat histori warga Kampung Pulo saat menetap di awal rusun—pasca penggusuran—para warga mendapatkan bantuan hukum dari LSM Ciliwung Merdeka, sama sekali tidak dipungut biaya sedikit pun. Namun dalam prakteknya, para warga yang terdiri dari 3 RW, menjadi „terpecah belah“ dengan keberadaan tiga lembaga hukum yang berbeda dalam membantu penanganan masalah hukum warga Kampung Pulo. Amat disayangkan oleh para warga rusun, keberadaan LSM malah semakin „memperkeruh“ situasi yang ada. Seharusnya yang dilakukan LSM tersebut adalah upaya pendampingan (advokasi). Namun yang terjadi, kembali warga merasa dikecewakan karena dilepas begitu saja saat usaha warga kalah banding di kasasi. Ketika warga hendak mengajukan „Peninjauan Kembali“ (PK), warga merasa sangat dilelahkan (baik secara fisik maupun psikis) karena harus mengeluarkan data kembali dari awal.

Keberadaan tokoh dari kaum perempuan di rusunawa Jatinegara Barat inipun masih sangat sedikit. Belum aktifnya kegiatan PKK, contohnya, menjadi lemahnya saluran bagi pemberdayaan kaum perempuan di rusun ini. Setidaknya para perempuan memiliki wadah untuk berkumpul bersama dan terlatih

berorganisasi agar kedepannya mampu tampil sebagai perempuan yang mandiri.

Untuk bidang kehidupan lainnya, memang warga sangat terbantu dengan pendidikan sekolah anak yang gratis, tersedia kendaraan antar jemput gratis dan KJP. Namun, tetap saja dalam keseharian, anak-anak masih butuh sekedar *jajan* atau kebutuhan lain. Begitu pula kios baru yang merupakan program CSR sebuah perusahaan di Jakarta Utara yang diperuntukkan terbatas bagi pedagang (warga rusun) yang sudah lama. Yang dikeluhkan warga adalah adanya retribusi—sesuai Pergub— sebesar Rp 3.000/hari dianggap memberatkan warga.

Pada akhirnya, semua keluhan warga bermuara pada Surat Perjanjian yang berlaku selama 2 tahun. Ironisnya, warga sama sekali tidak mengetahui peraturan rinci yang tertuang dalam Surat Perjanjian (pengelola dan penghuni rusun) yang disebabkan ketiadaan sosialisasi di awal bagi seluruh penghuni rusun. Dengan semakin terbukanya warga menanggapi SP yang ada, warga bahkan mempertanyakan hal yang tidak terpikirkan peneliti sebelumnya. Berikut kutipan wawancara:

“Sekarang yang bikin pergub, melanggar hukum. Kita mau sepakat terus? Kecuali kalo yang bikin itu, meninggal. Kayak Ali Sadikin, boleh-boleh aja.. Ini yang bikin pergub melanggar hukum juga, dipenjarakan.. Apa kita masih taati aturan dia juga?”

Sebagai narasumber utama (*key informant*) adalah Mariamah. Ibu Mariamah telah menjadi ketua Rukun Tetangga (RT) selama puluhan tahun di Kalijodo dan juga selama menetap di Rusunawa Pulogebang (RPG). Selama menghabiskan 40 tahun lebih hidupnya di Kalijodo, Mariamah mengepalai kurang lebih 100 kepala keluarga. Perempuan (*single parent*) berusia 58 tahun menjadi ikon (simbol) yang kuat di kalangan warga di Kalijodo. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, sederhana, ramah, bersahaja, solider dan bertoleransi menguatkan posisi dirinya sebagai seorang pemimpin yang

dihormati dan disegani warganya. Memiliki rumah sederhana yang berada di pinggir jalan dan tidak berpagar, membuat masyarakat atau orang luar leluasa melintas bahkan singgah di rumah tersebut. Dikarenakan di rumah itu pulalah, Mariamah membuka usaha kecil-kecilan seperti warung sekaligus kios HP sederhana hingga akhirnya mampu membuka usaha salon. Bahkan berkat keuletannya, beliau mampu membangun empat rumah mewah sekaligus untuk diwariskan kepada empat anaknya. Akan tetapi sebelum rumah tersebut dihuni, semua bangunan di Kalijodo diluluhlantakkan seketika sebagai konsekuensi dari kebijakan pemprov DKI. Penganut nasrani ini mengisahkan getirnya kejadian yang menyimpannya dan warga Kalijodo terkait relokasi pemprov DKI Jakarta di 2015 lalu. Dari lubuk hati yang terdalam, tentu tidak ada individu yang rela meninggalkan kenyamanan hidup, begitu pula dengan warga di Kalijodo. Peristiwa penggusuran dirasa mendadak dan menimbulkan trauma yang mendalam dikarenakan kehilangan seluruh harta benda.

Terkait aspirasi yang terpendam dari penuturan narasumber utama selama menghuni di Rusunawa Pulogebang (RPG), berikut disajikan berdasarkan wawancara yang berlangsung pada 10 Maret 2017 di Lt 2, RPG:

“Tempo hari tu gini loh Bu. Saya sudah ke pak camat. Nanti mau dipinjamin modal 10 juta/KK, tapi nyatanya enggak. Diserahin ke RT, tanggungjawabin. Waktu itu, bank sampah juga begitu. Kalo ada yang lewat, jual. Kalo cuma ditumpuk doang?”

“Kalo koperasi itu, kasian orang-orang yang jualan itu. Ada orang ngutang dari luar, bunganya gede, jadi tergencet itu kasian. Koperasi gak minjem-minjemin duit, Bu. Dulu tiap bulan saya dapat beras sayur ke kota. Sekarang stop dulu habis pilkada. Blok saya ini kan pada sepi. Disini gak ada orang, pada jualan ke sono ke jembatan”.

Dari hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti turut merasakan masih banyaknya keluhan dan kebutuhan narasumber setelah 1,5 tahun menetap di RPG. Bidang kehidupan yang paling menonjol adalah lapangan ekonomi untuk „menyambung hidup“ dengan hilangnya mata pencaharian lama di tempat lama yang tidak bisa diupayakan lagi di tempat yang baru. Selain itu, fasilitas kesehatan juga belum lengkap. Yang tersedia hanya klinik kecil dengan obat-obatan generik yang ditangani perawat, bukan dokter. *Key informant* memiliki pengalaman terkait masalah kesehatan seperti yang dituturkan berikut:

“.. kalo orang tua, mana sampe sini naik turun tangga lagi, kempis-kempis lagi. Kalo naik, nafas sudah sesak, gitu-in dulu lah. Selama disini, naik terus, darahnya. Darah pernah 210/100, trus 180. Mungkin karna pikiran, tegang. Takut saya, bawa ke permai (klinik), duit lagi. Dikasih obat di bawah.”

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lainnya. Dalam keseharian, Nati (informan 1) adalah perempuan paruh baya yang kental dengan aksen Jawanya. Sosok beliau yang periang dan ramah, membuat suasana pertemuan terasa akrab dan tidak berjarak. Dengan santai, Nati menceritakan suka-duka keluarganya selama setahun lebih menetap di RPG. Diawal menghuni RPG, selama 3 bulan tinggal gratis lumayan agak membantu. Kondisi ruang tamu yang sempit, 2 kamar tidur yang juga tidak besar, kamar mandi serta dapur yang kecil, dirasakan Nati tidak terlalu nyaman untuk ditinggalin bersama dengan anak-anaknya, termasuk anaknya yang sudah berkeluarga yang memiliki anak balita.

Tiap bulan, rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 400.000, dimana Rp 254.000 untuk sewa kamar, sisanya untuk biaya air dan listrik. Dengan difasilitasi pihak pengelola tidak membayar sewa selama 3 bulan pertama di awal pindah ke RPG, sebenarnya keinginan ibu Nati adalah bisa menempati kamar yang masih

kosong. Karena di blok H dihuni oleh warga eks-Kalijodo, ibu Nati merasa keberatan jika kamar kosong diberikan (disewakan) ke orang lain, sementara beliau sendiri masih membutuhkan. Demikian halnya dengan kegiatan niaga untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Hampir semua warga eks-Kalijodo harus kehilangan mata pencaharian. Dahulu, warga (perempuan, khususnya) bekerja di sektor informal (misalnya: kerja serabutan, membantu pekerjaan rumah tangga-cuci gosok dan berdagang). Namun semenjak menghuni RSP, „ruang gerak“ semakin terbatas. Tidak semua warga rusun diperbolehkan membuka „lapak“nya masing-masing. Pihak pengelola rusun sebenarnya telah menyediakan beberapa kios di lapangan tengah. Di samping itu, banyak warga yang memiliki modal juga membuka dagangannya. Sehingga, warga eks-Kalijodo yang terakhir masuk ke wilayah RPG merasa memiliki peluang yang sedikit jika bersaing membuka dagangan seperti sembako, misalnya.

“Iya... udah sama-sama sakit, gitu..janganlah. Orang-orang yang punya duit, dikasih kantin di Kalijodo. Orang-orang gusuran Kalijodo, malah gak dapet. Kalo semua dah pada jualan, pembelinya gak ada. Modal saya juga gak punya. Saya KTP DKI Jakarta puluhan tahun, KK ada. Mau dapat kontrakan warung malah akhirnya dapat SPI.”

Kondisi yang sama juga dialami Ibu Sri (informan 2). Perempuan Jawa yang sudah lama menetap di Kalijodo ini—hampir 40 tahun sejak tahun 1970-an—masih mengalami kesulitan ekonomi pasca menghuni di rusun. Tidak memiliki penghasilan tetap, Ibu Sri tetap berupaya agar dapat bertahan hidup dengan aktivitas sekedarnya. Jika dahulu menjalankan usaha kredit barang dagangan di Kalijodo, usaha tersebut tidak bisa diteruskan lagi mengingat warga di rusun juga berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ibu Sri juga harus rela rumahnya diratakan sehingga harus memulai kehidupan dari awal („titik nol“) kembali. Tidak heran ketika masa 3 bulan gratis

sewa di rusun berakhir, keluarga Ibu Sri juga terpaksa menunggak pembayaran sewa kamar berbulan-bulan lamanya. Sampai-sampai, Ibu Sri meminta pinjaman bantuan dana sebesar Rp 30 juta dari keluarga di Jawa agar dapat „menyambung hidup“. Dari sekian banyak opini yang disampaikan, berikut cuplikan:

“Saya tuh mau kerja apa aja, ya ngepel..nyapu. Lihat tuh, kotornya. Padahal kalo kita disuruh bersih-bersih, minimal di blok kita ini aja, kan masih sanggup. Tapi ya itu, dari pengelola, harus laki-laki, minimal tamatan SMA.”

Opini yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan informan ke-3 terkait bidang ekonomi. Perempuan *single parent* yang memiliki seorang putra yang duduk di sekolah dasar ini masih kesulitan mencari pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoni di Kalijodo berkulat di setor informal seperti berniaga. Namun sayang, hampir 2 tahun berada di Kalijodo, Minah tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Jika sebelumnya masih bisa meminjam dari teman—sesama warga di Kalijodo—maka sekarang hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat masing-masing warga juga berusaha „bangkit“ dari keterpurukan dan memulai kembali „lembaran baru“ kehidupan mereka.

Berikut opini yang diungkapkan narasumber:

“Gak ada kerjaan. Saya mah kalo ada kerjaan, saya jalanin. Kalo pengelola, cuma nanggung tempat tinggal, gak ada lowongan. Gak betah, bosan, saya mau nyapu, negepel. Disini kan kalo punya keahlian, keluar. Keluar juga kalo gak ada modal, susah.”

Keluhan lain yang disampaikan narasumber adalah posisi kamar di lantai 5 yang ditempati. Lokasi paling atas memang menjadikan warga harus berfikir ulang jika mobilisasi (naik-turun tangga) terlalu sering.

Jika mengacu pada Teori Kelompok Bungkam, peneliti menemukan bahwasanya peran (sistem) bahasa yang ada dalam

komunitas/masyarakat yang terbungkam adalah sama. Dimana kaum perempuan tidak bebas mengungkapkan keinginan mereka melalui ujaran atau pendapat. Pihak pengelola yang adalah mayoritas dari *gender* pria mendominasi „bahasa“ yang digunakan. Para warga eks-Kalijodo yang mayoritas adalah kaum perempuan (dan *single parent*) tidak bisa sebebannya mengeluarkan pendapat pribadi jika bertentangan dengan aturan yang ada di rusun. Dalam konteks penelitian ini, kesamaan bahasa yang dituturkan oleh para perempuan tersebut adalah terkait ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Kesempatan tidak terbuka secara merata untuk diberikan „prioritas“ mendapatkan lahan atau tempat usaha di lingkungan rusun. Hal yang sama juga dialami oleh narasumber berikut.

Berdasarkan ringkasan komentar narasumber tersebut, ada keterkaitan dengan asumsi *Muted Group Theory*. Pada dasarnya, munculnya kelompok bungkam adalah disebabkan tekanan dan tindasan terhadap suatu kelompok baik dalam bentuk ras, *gender*, pekerjaan atau dimana suatu kelompok tersebut sulit menyampaikan gagasan atau ide. Dalam lingkungan masyarakat rusun, yang menjadi kelompok dominan bukan hanya pihak penguasa (baca: pengelola), melainkan kaum pria. Kaum pria (sebagai kepala rumah tangga) diprioritaskan untuk memperoleh pekerjaan di sekitar rusun, seperti petugas kebersihan sementara pihak perempuan hanya dapat berdagang di sekitar rusun dan tentunya mengurus rumah tangga. Selain faktor *gender* dan pekerjaan, pembungkaman dapat terjadi sebagai hasil dari ketidakpopuleran pandangan yang berusaha untuk diungkapkan seseorang.

Dari keseluruhan hasil penelitian, peneliti mengkategorisasikan temuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Opini Tersembunyi

Narasumber	Kehidupan Sosial	Peluang Ekonomi	Kebebasan Berpendapatan	Pemberdayaan	Fasilitas Rusun
K1	cukup	kecil	Ada	Kurang	Cukup

I1	cukup	kecil	Tidak ada	Kurang	Kurang
I2	cukup	kecil	Tidak ada	Kurang	Kurang
I3	cukup	kecil	Tidak ada	Kurang	Kurang
I4	--	kecil	Tidak ada	Kurang	Cukup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya opini perempuan menguatkan Teori Kelompok Bungkam. Para perempuan belum terlalu „berani“ (frontal) menyikapi program atau kebijakan yang diterapkan yang belum sesuai dengan aspirasi warga perempuan. Disamping itu, kaum perempuan yang menjadi kelompok minoritas juga masih harus tunduk (menyesuaikan) dengan kebijakan yang ditetapkan kelompok dominan (dalam hal ini: pihak pengelola).

Referensi

- Arifin, Anwar. 2008. *Opini Publik*. Pustaka Indonesia. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Denzin, Norman K & Yvonna S Lincoln. 2011. *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, Inc. USA
- Griffin, Em. 2012. *A First Look at Communication Theory: Eight Edition*. McGraw Hill. New York
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Lestari dan Dewi. 2010. *Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8 Nomor 2, Mei-Agustus 2010, halaman 191-203.

Littlejohn, Stephen W & Karen A Foss. 2011. *Teori Komunikasi: Edisi 9*. Salemba Humanika. Jakarta

Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media. Jakarta

Mulyana, Deddy dan Solatun. 2008. *Metode Penelitian komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Remaja Rosdakarya. Bandung

Musta'in. 2013. *Sisi Lain Perempuan Dalam Sorotan Media; Tinjauan Teori Kelompok Bungkam (Muted Group Theory-Management)*. JSJI, Vol 04, No. 01, Agustus 2013. STAIN Purwokerto. ISSN: 2087-9830

Neumann, W. Lawrance. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Edisi 7*. PT Indeks. Jakarta

Nurul Ilmi Idrus. 2006. *Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi gender dan Relativisme Budaya di Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia Volume 30 No. 3, 2006. Universitas Hasanuddin.

Olii, Helena. (2007). *Opini Publik*. PT Indeks. Jakarta

Rohim, S. 2009. *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam & Aplikasi*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Soemirat, Sholeh & Elvinaro Ardianto. 2008. *Dasar-dasar Public Relations: Cetakan ke-6*. Remaja Rosda Karya. Bandung

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan HRD*. Alfabeta: Bandung

West, Richard & Lynn H Turner. 2010. *Teori Komunikasi: Analisis dan aplikasi: Buku 2 edisi 3*. Salemba Humanika. Jakarta

m.liputan6.com/news/read/2159895/ini-5-target-penertiban-pemprov-dki-di-tahun-2015